PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

UNIT KERJA : **SEKRETARIAT DAERAH**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUMARNO**
2. Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH**
3. NHK : **50853**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp. 1.500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/45 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/120 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah Seluas 140 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 133 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — Rp. 527.000.000

1. MOBIL, SUZUKI SWIFT MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. LAINNYA, BROMPTON SEPEDA (ROW LACQUER) Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
4. LAINNYA, SEPEDA GIANT PROPEL Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
5. LAINNYA, S WORK SL 6 SEPEDA Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 32.000.000
6. MOTOR, YAMAHA S MAX Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 48.000.000

7. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000

C.	**HARTA BERGERAK LAINNYA**	**Rp.**	**65.000.000**
D.	**SURAT BERHARGA**	**Rp.**	**----**
E.	**KAS DAN SETARA KAS**	**Rp.**	**1.584.215.804**
F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**4.305.218.119**
	Sub Total	**Rp.**	**7.981.433.923**
III. HUTANG		**Rp.**	**120.000.750**
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)		**Rp.**	**7.861.433.173**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.